

ABSTRAK

Penelitian ini befokus pada Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Kemudian Pemerintah Kota Tasikmalaya menerbitkan suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 sebagai bentuk keseriusan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle, yang menekankan dua aspek utama yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

Secara umum, implementasi berjalan sesuai tujuan kebijakan tetapi tidak mencapai target dengan cepat dan maksimal. Pada indikator isi kebijakan (*content of policy*) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya memiliki kapasitas administrasi yang cukup baik dalam menjalani kebijakan, namun masih cenderung menjalankannya secara prosedural dan lebih berfokus pada penyaluran bantuan sosial. Hal ini menyebabkan penurunan angka kemiskinan cenderung lambat karena tidak meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Lalu untuk lingkungan implementasi (*context of implementation*) Kualitas para pelaksana sudah memadai namun peran TKPKD belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari pelaksanaan program masih bersifat sektoral dan belum meratanya efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu faktor anggaran dan juga mindset masyarakat yang ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah juga sangat mempengaruhi jalannya kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Sosial.

ABSTRACT

This research focuses on the analysis of the implementation of Tasikmalaya City Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning Poverty Alleviation. The study is motivated by the high poverty rate in Tasikmalaya City. In response to this issue, the Tasikmalaya City Government issued Regional Regulation Number 3 of 2022 as a form of commitment to addressing poverty through a structured and sustainable policy. This study applies Merilee S. Grindle's theory of public policy implementation, which emphasizes two main aspects: the content of policy and the context of implementation. The purpose of this research is to analyze the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2022 carried out by the Social Service of Tasikmalaya City and to identify its supporting and inhibiting factors.

The research employs a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The validity of the data was tested through source and technique triangulation.

In general, implementation proceeded according to policy objectives but did not achieve targets quickly and optimally. Regarding the policy content indicator, the Tasikmalaya City Social Service has sufficient administrative capacity to implement the policy, but still tends to implement it procedurally and focuses more on distributing social assistance. This has resulted in a slow decline in poverty rates because it does not improve the community's economic standard. Regarding the context of implementation, the quality of implementers is adequate but is constrained by quantity and a heavy workload. Furthermore, budgetary factors and the community's dependence on government assistance also significantly influence the policy's implementation.

Keywords: Policy Implementation, Poverty Alleviation, Social Service.